

Konstruksi Negara atas Kepahlawanan: Analisis Wacana Historiografis Representasi Teuku Umar di Indonesia

Sudarman¹, Najamudin², Zuhrizal Fadhly³, Cut Asmaul Husna⁴, Sri Wahyu Handayani⁵

¹²³⁴⁵Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia; sudarman@utu.ac.id

* Correspondence : sudarman@utu.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis bagaimana negara mengonstruksi kepahlawanan melalui representasi Teuku Umar dalam historiografi Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis wacana historiografis. Pada periode kolonial, Teuku Umar direpresentasikan sebagai “pengkhianat” dan figur yang tidak dapat dipercaya dalam narasi pemerintah kolonial Belanda. Sebaliknya, dalam historiografi nasional pascakemerdekaan, representasi tersebut direkonstruksi menjadi “pahlawan nasional” yang heroik dan patriotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transformasi tersebut merupakan bagian dari konstruksi negara dalam membentuk narasi kepahlawanan, serta untuk mengungkap relasi antara pengetahuan sejarah, kekuasaan, dan legitimasi dalam konteks administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber historiografi kolonial dan nasional sebagai praktik diskursif yang merefleksikan kepentingan dan orientasi kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi Teuku Umar tidak bersifat netral, melainkan merupakan produk konstruksi ideologis yang dipengaruhi oleh kepentingan politik negara dan dinamika sosial-historis. Transformasi dari “pengkhianat” menjadi “pahlawan” mencerminkan praktik politik memori sebagai bagian dari upaya negara dalam membangun legitimasi, identitas nasional, dan otoritas simbolik. Temuan ini menegaskan bahwa historiografi berfungsi tidak hanya sebagai rekaman peristiwa, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola memori publik yang berperan dalam membentuk makna, legitimasi, dan pemahaman kolektif tentang kepemimpinan dan kepahlawanan dalam kerangka administrasi publik.

Kata kunci: Historiografi Indonesia; Kepahlawanan; Konstruksi Negara; Legitimasi; Politik Memori; Wacana Historiografis;

ABSTRACT

This article analyzes how the state constructs heroism through the representation of Teuku Umar in Indonesian historiography, using a historiographic discourse analysis. During the colonial period, Teuku Umar was portrayed as a “traitor” and an untrustworthy figure in the Dutch colonial government's narrative. Conversely, in post-independence national historiography, this representation was reconstructed as a heroic and patriotic “national hero.” This study aims to examine how this transformation is part of the state's construction of the heroic narrative, and to uncover the relationship between historical knowledge, power, and legitimacy in the context of public administration. This study uses qualitative methods by analyzing colonial and national historiographic sources as discursive practices that reflect the interests and orientations of power. The results show that the representation of Teuku Umar is not neutral, but rather a product of ideological construction influenced by the state's political interests and socio-historical dynamics. The transformation from “traitor” to “hero” reflects the practice of memory politics within the state's efforts to build legitimacy, national identity, and symbolic authority. This finding confirms that historiography functions not only as a record of events but also as an instrument of public memory governance, shaping meaning, legitimacy, and the collective understanding of leadership and heroism within the framework of public administration.

Keywords : Historiography Of Indonesia; Heroism; Legitimacy; Politics Of Memory; Historiographical Discourse

Pendahuluan

Penelitian ini membahas historiografi sebagai konstruksi pengetahuan yang tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, perspektif, dan konteks sosial-politik tertentu. Historiografi tidak hanya merekam peristiwa masa lalu secara objektif, tetapi juga melibatkan proses seleksi, interpretasi, dan representasi yang sarat dengan nilai dan ideologi, sehingga tidak semua fakta memperoleh ruang yang setara dalam narasi sejarah (Stephen, 2020). Dalam kerangka tersebut, sejarah dapat dipahami sebagai bagian dari relasi kekuasaan, di mana produksi pengetahuan historis berkaitan erat dengan aktor-aktor yang memiliki otoritas dalam menentukan makna dan kebenaran (Førland, 2017). Dengan demikian, historiografi menjadi arena diskursif tempat kekuasaan bekerja melalui pembentukan wacana dan legitimasi terhadap peristiwa maupun tokoh tertentu.

Dalam perspektif administrasi publik, relasi tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan aktor utama yang tidak hanya mengelola kebijakan dan sumber daya, tetapi juga mengelola narasi sejarah sebagai bagian dari tata kelola memori publik (*governance of memory*) (Koliba et al., 2017; Verovšek, 2016). Melalui berbagai instrumen seperti pendidikan, kurikulum, dan produksi pengetahuan resmi, negara secara aktif membentuk dan mereproduksi pemahaman kolektif masyarakat terhadap masa lalu. Proses ini berimplikasi langsung pada pembentukan legitimasi dan identitas nasional, di mana historiografi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun otoritas simbolik dan memperkuat posisi negara dalam kehidupan sosial-politik (Keating et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, historiografi memiliki peran yang signifikan dalam proses pembentukan identitas nasional, khususnya melalui konstruksi kepahlawanan. Sejak masa pascakemerdekaan, negara secara aktif terlibat dalam menentukan siapa yang layak diakui sebagai pahlawan nasional serta bagaimana narasi perjuangan mereka direpresentasikan dalam sejarah resmi. Proses ini menunjukkan bahwa kepahlawanan tidak semata-mata merupakan refleksi objektif dari fakta sejarah, tetapi juga hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh kepentingan negara dalam membangun simbol-simbol kolektif yang dapat mempersatukan masyarakat (Fogg, 2019; Franklin & Hägerdal, 2024; Parry, 2021).

Lebih lanjut, sejarah dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik, di mana negara menggunakan narasi kepahlawanan untuk memperkuat otoritas dan membangun kepercayaan publik terhadap kekuasaan yang dijalankan. Melalui institusionalisasi sejarah dalam pendidikan, kebijakan, dan simbol-simbol nasional, negara tidak hanya mereproduksi memori kolektif, tetapi juga mengarahkan interpretasi masyarakat terhadap masa lalu sesuai dengan kepentingan ideologis tertentu. Dengan demikian, konstruksi kepahlawanan dalam historiografi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya negara dalam membangun legitimasi dan stabilitas politik melalui pengelolaan narasi sejarah.

Salah satu contoh yang menunjukkan dinamika tersebut adalah representasi Teuku Umar dalam historiografi Indonesia. Dalam narasi kolonial Belanda, Teuku Umar sering digambarkan sebagai sosok pengkhianat yang tidak loyal dan oportunistis, terutama karena strategi perlawanan yang melibatkan kerja sama taktis dengan pihak kolonial sebelum

berbalik melawan (Putra & Ma'rif, 2020; Rohmana, 2021). Sebaliknya, dalam historiografi nasional pascakemerdekaan, representasi tersebut mengalami perubahan drastis, di mana Teuku Umar dikonstruksikan sebagai pahlawan nasional yang heroik, patriotik, dan memiliki komitmen tinggi terhadap perjuangan melawan penjajahan (Aulia, 2024).

Kontras yang tajam antara dua representasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan makna atas figur Teuku Umar bukan sekadar hasil penemuan fakta sejarah yang baru, melainkan mencerminkan adanya proses konstruksi yang dipengaruhi oleh kepentingan dan konteks kekuasaan yang berbeda. Dalam hal ini, transformasi dari "pengkhianat" menjadi "pahlawan" tidak dapat dipahami sebagai perubahan biasa, tetapi sebagai indikasi kuat dari peran negara dalam membentuk dan mengarahkan narasi historiografis. Dengan demikian, representasi Teuku Umar menjadi pintu masuk analitis untuk memahami bagaimana negara mengonstruksi kepahlawanan sebagai bagian dari strategi legitimasi dan pembentukan identitas nasional.

Penelitian ini berpijak pada pendekatan analisis wacana historiografis yang melihat sejarah sebagai praktik diskursif yang tidak terlepas dari relasi kekuasaan. Dalam perspektif ini, historiografi dipahami sebagai proses produksi makna yang melibatkan seleksi, interpretasi, dan representasi atas peristiwa masa lalu dalam kerangka kepentingan tertentu (Burke, 2019; Foucault, 1994). Konsep politik memori digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara berperan dalam memilih, mengelola, dan mereproduksi ingatan kolektif melalui narasi sejarah yang dilegitimasi secara institusional (Paul Ricoeur, 2004; Jan Assmann, 2011). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada relasi pengetahuan dan kekuasaan yang menekankan bahwa produksi pengetahuan, termasuk historiografi, tidak pernah bebas dari pengaruh struktur kekuasaan yang menentukan apa yang dianggap benar dan sah (Michel Foucault, 1980). Dengan kerangka ini, historiografi tidak hanya dipandang sebagai representasi masa lalu, tetapi sebagai arena di mana makna, legitimasi, dan otoritas simbolik dikonstruksikan.

Sejumlah penelitian telah membahas Teuku Umar sebagai tokoh sejarah penting dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme, dengan penekanan pada aspek biografis, strategi perjuangan, serta perannya dalam sejarah Aceh dan Indonesia secara umum (Anzalimuddin et al., 2024). Namun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan Teuku Umar sebagai subjek historis yang bersifat deskriptif, dan belum banyak mengkaji bagaimana representasinya dibentuk sebagai bagian dari konstruksi negara dalam historiografi (Deliana, 2018). Selain itu, keterkaitan antara konstruksi kepahlawanan dengan perspektif administrasi publik, khususnya dalam konteks legitimasi kekuasaan dan tata kelola memori publik, masih relatif terbatas dalam literatur yang ada (Fahmi, 2021).

Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang penting untuk dikaji, yaitu memahami representasi Teuku Umar bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai produk konstruksi diskursif yang diproduksi dan direproduksi oleh negara dalam kerangka kepentingan tertentu (Foucault, 1994). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap bagaimana historiografi berfungsi sebagai instrumen legitimasi dan bagaimana negara membangun otoritas simbolik melalui narasi kepahlawanan

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara mengonstruksi kepahlawanan melalui representasi Teuku Umar dalam historiografi Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana representasi kepahlawanan dibentuk dan direpresentasikan dalam narasi sejarah,

serta bagaimana proses tersebut berkaitan dengan relasi kekuasaan dan kepentingan politik yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada perubahan makna historis, tetapi juga pada mekanisme diskursif yang memungkinkan negara memproduksi dan mereproduksi narasi kepahlawanan sebagai bagian dari strategi legitimasi dan pembentukan identitas nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis wacana historiografis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana makna kepahlawanan dibentuk melalui praktik diskursif yang berkaitan dengan relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan negara. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada isi teks sejarah, tetapi juga pada proses produksi makna yang melatarbelakanginya. Subjek dalam penelitian ini adalah teks-teks historiografi yang merepresentasikan Teuku Umar dalam dua konteks utama, yaitu historiografi kolonial dan historiografi nasional, sedangkan objek penelitian adalah representasi kepahlawanan yang dikonstruksi dalam teks tersebut (Flowerdew & Richardson, 2017; Gee & Handford, 2023).

Penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap bentuk representasi, bahasa, dan narasi yang digunakan dalam teks, tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran faktual peristiwa sejarah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi arsip kolonial, buku sejarah, tulisan akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi terhadap fokus kajian, kredibilitas sumber, serta kemampuannya dalam merepresentasikan wacana historiografis yang dianalisis (Gill et al., 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan penelusuran sumber, seleksi dokumen, dan pembacaan kritis terhadap teks. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti penggunaan istilah kunci, struktur narasi, serta pola representasi yang digunakan dalam menggambarkan tokoh yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan analisis wacana historiografis yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) identifikasi bentuk representasi dalam teks, (2) analisis konteks produksi wacana, dan (3) interpretasi relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan legitimasi. Analisis dilakukan secara komparatif antara historiografi kolonial dan nasional untuk mengidentifikasi perbedaan konstruksi makna, serta secara iteratif untuk memastikan kedalaman interpretasi (Fairclough, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Representasi Teuku Umar dalam Historiografi Kolonial

Dalam historiografi kolonial Belanda, Teuku Umar direpresentasikan sebagai sosok yang tidak loyal, oportunistis, dan cenderung berkhianat terhadap otoritas kolonial. Narasi yang berkembang dalam sumber-sumber kolonial menempatkannya sebagai figur yang tidak dapat dipercaya, terutama karena strategi perlawanan yang melibatkan kerja sama taktis dengan pihak Belanda sebelum berbalik melawan. Tindakan tersebut tidak dipahami sebagai strategi perang, melainkan sebagai bentuk ketidaksetiaan yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan kolonial (Fahmi, 2021). Dengan demikian, representasi yang dibangun lebih

menekankan pada aspek negatif yang mendiskreditkan peran Teuku Umar dalam konteks perlawanan.

Secara diskursif, representasi tersebut dibentuk melalui penggunaan bahasa yang mengandung penilaian moral dan delegitimasi. Istilah seperti “pengkhianat”, “tidak loyal”, dan “oportunis” berfungsi tidak hanya sebagai deskripsi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membingkai tindakan Teuku Umar dalam kerangka negatif. Selain itu, narasi kolonial cenderung menempatkan Teuku Umar sebagai ancaman terhadap stabilitas dan ketertiban yang ingin ditegakkan oleh pemerintah kolonial. Pola naratif ini menunjukkan adanya strategi wacana yang sistematis dalam membangun citra tertentu, di mana tindakan perlawanan lokal direduksi menjadi perilaku menyimpang yang perlu dikendalikan.

Produksi wacana tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan kolonial yang berupaya mempertahankan dominasi di wilayah jajahan. Dalam situasi konflik seperti Perang Aceh, narasi yang menggambarkan tokoh perlawanan sebagai pengkhianat atau ancaman menjadi penting untuk membenarkan tindakan represif dan memperkuat legitimasi kekuasaan kolonial. Dalam hal ini, historiografi berfungsi sebagai instrumen ideologis yang mendukung kepentingan kolonial, di mana produksi pengetahuan digunakan untuk mengontrol persepsi dan membentuk realitas sosial sesuai dengan kepentingan penguasa (Cain & Harrison, 2023).

Dalam perspektif administrasi publik, representasi ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya legitimasi kekuasaan dan kontrol simbolik yang dilakukan oleh rezim kolonial. Negara kolonial tidak hanya mengelola wilayah dan sumber daya, tetapi juga mengelola narasi dan makna melalui produksi historiografi. Dengan demikian, wacana kolonial tentang Teuku Umar mencerminkan bentuk awal tata kelola memori publik, di mana narasi sejarah digunakan sebagai instrumen untuk membangun otoritas, mengarahkan persepsi masyarakat, dan mempertahankan stabilitas kekuasaan.

2. Transformasi Representasi dalam Historiografi Nasional

Dalam historiografi nasional pascakemerdekaan, terjadi pergeseran signifikan dalam representasi Teuku Umar, dari figur yang sebelumnya dilabeli sebagai pengkhianat dalam narasi kolonial menjadi pahlawan nasional yang heroik, patriotik, dan nasionalis. Narasi yang dibangun menempatkannya sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan, dengan penekanan pada keberanian, kecerdikan strategi, dan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan (Mahardika & Ramadhan, 2021). Pergeseran ini menunjukkan perubahan mendasar dalam cara sejarah ditafsirkan, di mana tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan direinterpretasi sebagai strategi perjuangan yang cerdas dan taktis.

Secara diskursif, transformasi tersebut dibentuk melalui penggunaan bahasa yang menekankan nilai-nilai seperti perjuangan, pengorbanan, dan kepahlawanan. Istilah-istilah ini berfungsi untuk membangun citra ideal sekaligus memperkuat legitimasi moral atas peran tokoh dalam sejarah nasional. Dalam proses ini, kompleksitas sejarah cenderung disederhanakan melalui narasi yang lebih linear dan normatif, sehingga ambiguitas tindakan historis tidak lagi menjadi fokus utama (Salma & Asmaul Husna, 2021). Strategi ini memungkinkan terbentuknya narasi yang lebih mudah diterima sebagai kebenaran kolektif.

Produksi wacana nasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks pascakemerdekaan, di mana negara menghadapi kebutuhan untuk membangun identitas

nasional dan memperkuat integrasi sosial. Dalam situasi tersebut, figur kepahlawanan menjadi simbol penting yang digunakan untuk merepresentasikan nilai kebangsaan dan persatuan. Negara berperan aktif dalam membentuk narasi sejarah melalui institusi seperti pendidikan dan kurikulum, sehingga historiografi menjadi bagian dari proyek nasional dalam membangun kesadaran kolektif (Lazuardi, 2024).

Dalam perspektif administrasi publik, transformasi ini menunjukkan bahwa historiografi berfungsi sebagai instrumen legitimasi negara sekaligus alat pembentukan identitas nasional. Narasi sejarah tidak hanya menyampaikan masa lalu, tetapi juga membentuk kerangka makna kolektif yang digunakan masyarakat dalam memahami dirinya sebagai bagian dari bangsa. Dalam konteks ini, konsep politik memori menjelaskan bagaimana negara mengelola ingatan kolektif melalui narasi yang dilegitimasi, sementara relasi antara pengetahuan dan kekuasaan menegaskan bahwa produksi historiografi tidak terlepas dari kepentingan ideologis tertentu (Hakim, 2018). Dengan demikian, transformasi representasi Teuku Umar mencerminkan peran negara dalam mengonstruksi makna historis sebagai bagian dari strategi kekuasaan simbolik.

3. Konstruksi Negara atas Kepahlawanan dan Politik Memori

Perbandingan antara historiografi kolonial dan nasional menunjukkan adanya pergeseran representasi Teuku Umar yang sangat kontras, dari figur pengkhianat menjadi pahlawan nasional. Perubahan ini tidak dapat dipahami sebagai refleksi netral dari fakta sejarah, melainkan sebagai hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh konteks kekuasaan yang berbeda. Dalam historiografi kolonial, representasi dibentuk untuk mendukung legitimasi dominasi Belanda dengan mendiskreditkan perlawanan lokal, sementara dalam historiografi nasional, representasi direkonstruksi untuk memperkuat narasi perjuangan dan identitas kebangsaan. Dengan demikian, makna kepahlawanan bersifat dinamis dan bergantung pada aktor yang memproduksi serta mereproduksi narasi sejarah (Ardhana & Puspitasari, 2024; Foucault, M., & Nazzaro, 1972).

Dalam konteks ini, negara dapat dipahami sebagai aktor diskursif yang berperan aktif dalam memproduksi makna melalui historiografi. Negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya, tetapi juga berfungsi sebagai produsen narasi yang menentukan bagaimana masa lalu dipahami oleh masyarakat. Historiografi, dalam hal ini, menjadi bagian dari praktik administrasi simbolik yang memungkinkan negara membangun otoritas dan legitimasi melalui pengendalian makna. Dengan mengatur representasi kepahlawanan, negara menciptakan kerangka interpretasi yang mengarahkan cara masyarakat memahami sejarah dan posisi mereka dalam komunitas nasional (Frisk, 2019).

Lebih lanjut, proses tersebut dapat dipahami melalui konsep tata kelola memori publik (*governance of memory*), di mana negara berperan dalam memilih, menyederhanakan, dan menegaskan narasi tertentu sebagai bagian dari memori kolektif. Dalam praktiknya, tidak semua peristiwa atau tokoh memperoleh ruang yang sama dalam historiografi; sebaliknya, negara secara selektif mengangkat narasi yang dianggap relevan dengan kepentingan ideologis dan politik. Memori publik, dalam konteks ini, menjadi objek yang dikelola melalui institusi seperti pendidikan, kurikulum, dan produksi pengetahuan resmi. Dengan demikian, konstruksi kepahlawanan tidak hanya mencerminkan interpretasi terhadap masa lalu, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara menggunakan historiografi sebagai instrumen strategis

dalam membentuk identitas, legitimasi, dan stabilitas sosial-politik (Danilova & Kolpinskaya, 2020).

Konstruksi kepahlawanan dalam konteks sosial-politik tidak hanya berfungsi sebagai narasi historis, tetapi juga sebagai sumber legitimasi dan instrumen politik yang strategis. Kepahlawanan seringkali digunakan oleh aktor negara maupun elit lokal untuk memperkuat otoritas, membangun kepercayaan publik, serta membenarkan kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, simbol-simbol kepahlawanan tidak bersifat netral, melainkan diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan tertentu, sehingga membentuk otoritas simbolik yang memperkuat posisi kekuasaan (Rosyidin et al., 2025). Perspektif ini menunjukkan bahwa kepahlawanan memiliki dimensi simbolik yang kuat dalam proses legitimasi kekuasaan. Jika dikaitkan dengan administrasi publik, maka peran institusi tidak lagi terbatas pada pengelolaan sumber daya secara teknokratis, tetapi juga mencakup pengelolaan makna (*management of meaning*), di mana nilai, simbol, dan narasi digunakan untuk membentuk persepsi publik dan memperkuat legitimasi kebijakan. Dengan demikian, administrasi publik beroperasi tidak hanya dalam ranah administratif, tetapi juga dalam arena simbolik yang menentukan bagaimana kekuasaan diterima dan dipahami oleh masyarakat.

historiografi tidak semata-mata dapat diposisikan sebagai aktivitas penulisan sejarah yang bersifat deskriptif, melainkan juga sebagai bagian dari praktik governance yang memiliki peran strategis dalam membentuk legitimasi dan arah kebijakan publik. Dalam konteks ini, proses produksi narasi sejarah termasuk konstruksi kepahlawanan dapat dipahami sebagai ruang di mana aktor negara dan pembuat kebijakan secara simultan membentuk dan mengelola ingatan kolektif masyarakat (Ball, 2017; Sun & Xu, 2025). Dengan demikian, historiografi tidak hanya merepresentasikan masa lalu, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kerangka makna yang memengaruhi bagaimana kekuasaan dipahami dan diterima.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi Teuku Umar dalam historiografi Indonesia merupakan produk konstruksi negara yang beroperasi dalam medan relasi pengetahuan dan kekuasaan. Perbedaan representasi antara historiografi kolonial dan nasional tidak sekadar mencerminkan perbedaan perspektif historis, tetapi merefleksikan konfigurasi kekuasaan yang menentukan produksi, legitimasi, dan sirkulasi makna. Dalam konteks ini, transformasi dari “pengkhianat” menjadi “pahlawan” menegaskan bahwa kepahlawanan merupakan kategori diskursif yang dikonstruksi melalui politik memori, di mana negara secara aktif mengatur seleksi, interpretasi, dan institusionalisasi narasi sejarah guna membentuk legitimasi dan identitas kolektif.

Lebih lanjut, temuan ini mengafirmasi bahwa historiografi berfungsi sebagai perangkat epistemik sekaligus instrumen governance, yang memungkinkan negara tidak hanya mengatur realitas material, tetapi juga mendisiplinkan cara masyarakat memahami masa lalu. Dengan demikian, administrasi publik tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai praktik teknokratis, melainkan sebagai arena produksi makna yang melibatkan artikulasi simbolik, representasi, dan otoritas diskursif. Implikasi teoretis dari penelitian ini mendorong perluasan paradigma administrasi publik ke arah pendekatan yang lebih interpretatif dan kritis, dengan menempatkan memori kolektif, narasi, dan konstruksi simbolik sebagai elemen integral dalam analisis kekuasaan. Oleh karena itu, studi lanjutan perlu mengeksplorasi

dinamika produksi historiografi dalam relasi multi-aktor, termasuk peran aktor non-negara, serta bagaimana kontestasi memori berlangsung dalam ruang kebijakan publik yang lebih luas.

Referensi

- Anzalimuddin, A., Umar, M., & Kesuma, T. B. (2024). Resistance Against Dutch Colonialism in Kluet 1925-1927. *Diakronika*, 24(2), 78–91. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol24-iss2/343>
- Ardhana, I. K., & Puspitasari, N. W. R. N. (2024). Metodologi dan Historiografi Indonesia: Tantangan Indonesiasentrisme dalam Era Global. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.62924/jsi.v7i1.33013>
- Ball, S. (2017). Michel Foucault and Education Policy Analysis. In S. Ball (Ed.), *Michel Foucault and Education Policy Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315647258>
- Burke, P. (2019). *What is cultural history?*. John Wiley & Sons.
- Cain, P. J., & Harrison, M. (2023). IMPERIALISM: Critical Concepts in Historical Studies, VOLUME III. In *Imperialism: Critical Concepts in Historical Studies: Volume III* (Vol. 3). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003101536>
- Danilova, N., & Kolpinskaya, E. (2020). The politics of heroes through the prism of popular heroism. *British Politics*, 15(2), 178–200. <https://doi.org/10.1057/s41293-019-00105-8>
- Deliana, N. (2018). Aceh and Council of Eight in Penang 1873-1876. In *The Journal of Humanity & Society (Īnsan & Toplum Dergisi)* (Vol. 8, Issue 3). <https://doi.org/10.12658/m0266>
- Fahmi, C. (2021). The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehese Natives. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 10(2), 248–273. <https://doi.org/10.31291/hn.v10i2.628>
- Fairclough, N. (2023). Critical discourse analysis. In *The Routledge handbook of discourse analysis*. In *Reviewing Qualitative Research in the Social Sciences* (Vol. 7, Issue July).
- Flowerdew, J., & Richardson, J. E. (2017). The routledge handbook of critical discourse studies. In J. Flowerdew & J. E. Richardson (Eds.), *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315739342>
- Fogg, K. W. (2019). Making an Indonesian National Hero for Lombok. *Indonesia and the Malay World*, 47(137), 1–22. <https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1560710>
- Førland, T. E. (2017). Values, objectivity, and explanation in historiography. In *Values, Objectivity, and Explanation in Historiography*. <https://doi.org/10.4324/9781315470979>
- Foucault, M., & Nazzaro, A. M. (1972). *History, discourse and discontinuity*. (pp. 225-248.).
- Foucault, M. (1994). An archaeology of the Human Sciences. In *Contemporary nurse a journal for the Australian nursing profession (1994)* (Vol. 30, Issue 2).
- Franklin, N., & Hägerdal, H. (2024). Indonesian Heroes and Villains: National Identity, Politics, Law, and Security. *Politics and Governance*, 12. <https://doi.org/10.17645/pag.8383>
- Frisk, K. (2019). What Makes a Hero? Theorising the Social Structuring of Heroism. *Sociology*, 53(1), 87–103. <https://doi.org/10.1177/0038038518764568>
- Gee, J. P., & Handford, M. (2023). The Routledge Handbook of Discourse Analysis. In *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003035244>
- Gill, M. J., Gill, D. J., & Roulet, T. J. (2018). Constructing Trustworthy Historical Narratives: Criteria, Principles and Techniques. *British Journal of Management*, 29(1), 191–205.

- <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12262>
- Hakim, L. (2018). HISTORIOGRAFI MODERN INDONESIA: Dari Sejarah Lama Menuju Sejarah Baru. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.75>
- Keating, M., Wanna, J., & Weller, P. (2020). Institutions on the edge?: Capacity for governance. In M. Keating, J. Wanna, & P. Weller (Eds.), *Institutions on the edge?: Capacity for governance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003116127>
- Koliba, C., Meek, J. W., & Zia, A. (2017). Governance Networks in Public Administration and Public Policy. In *Governance Networks in Public Administration and Public Policy*. <https://doi.org/10.4324/9781315093451>
- Lazuardi, M. F. (2024). Historiografi Demokrasi dan Masalah Periodisasi Sejarah Indonesia Kontemporer. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 7(2), 181–191. <https://doi.org/10.62924/jsi.v7i2.33073>
- Mahardika, M. D. G., Tricahyono, D., Pratiwi, E. P., & Ramadhan, F. N. (2021). (2021). *Historiografi Indonesiasentris: problematika dan tantangan*. HISTORIOGRAPHY Учредители: State University of Malang (UM).
- Parry, K. D. (2021). The formation of heroes and the myth of national identity. *Sport in Society*, 24(6), 886–903. <https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1733531>
- Putra, Z., & Ma'ruf, J. J. (2020). Konsep Kepemimpinan Teuku Umar dalam Konteks Ilmu Manajemen Kontemporer: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.35308/jbkan.v4i2.3896>
- Rahmatul Aulia. (2024). Dutch Strategy in West Aceh (Aceh War, 1873-1906). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 267–273. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3411>
- Rohmana, J. A. (2021). Colonial informants and the Acehese-Dutch war: Haji Hasan Mustapa's response to Teuku Umar's collaboration with the Dutch authorities in the East Indies. *Indonesia and the Malay World*, 49(143), 63–81. <https://doi.org/10.1080/13639811.2021.1855022>
- Rosyidin, M., Rum, M., & Nandyatama, R. W. (2025). Norms as a status marker: social creativity and Indonesia's recognition game in the indo-Pacific. *Contemporary Politics*, 32(2), 196–221. <https://doi.org/10.1080/13569775.2025.2503963>
- Salma, S., & Asmaul Husna, C. (2021). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam Pengawasan Kebijakan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(12), 957–970. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i12.89>
- Stephen J. Page, J. C. (2020). The Routledge Handbook of Events. In S. J. Page & J. Connell (Eds.), *The Routledge Handbook of Events*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429280993>
- Sun, Y., & Xu, C. (2025). Words are weapons: narrative techniques and legitimacy building. *Management Decision*, 64(3), 797–830. <https://doi.org/10.1108/MD-03-2024-0647>
- Verovšek, P. J. (2016). Collective memory, politics, and the influence of the past: the politics of memory as a research paradigm. *Politics, Groups, and Identities*, 4(3), 529–543. <https://doi.org/10.1080/21565503.2016.1167094>